

BAB III

POLITIK IDENTITAS ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILUKADA DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Politik Identitas Etnis Tionghoa Terjadi Dalam Pemilukada Di Kota Singkawang Tahun 2017.

Politik identitas etnis Tionghoa memang sangat jarang ditemui, tidak ada yang melatarbelakangi secara khusus akan tetapi keterlibatan etnis Tionghoa bergabung dalam dunia politik melainkan karena undang-undang yang sudah mengizinkan. Tidak menutup kemungkinan hal ini menjadi sangat mudah untuk Kota Singkawang. Politik identitas etnis Tionghoa pertama kali terjadi di Kota Singkawang pada tahun 2008, ini merupakan eforia masyarakat etnis Tionghoa bergabung dalam dunia politik untuk pertama kalinya ketika anggota etnis ini mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Masyarakat etnis Tionghoa bangga karena merasa memiliki perwakilan dalam dunia politik.

Pasca kemerdekaan Indonesia inilah pertama kalinya etnis Tionghoa melibatkan diri dalam berdemokrasi. Alasan masyarakat etnis Tionghoa bergabung dalam dunia politik untuk pertama kalinya hanya karena eforia tersebut. Walikota terpilih di Kota Singkawang pada tahun 2009 dari etnis Tionghoa, masyarakat Kota Singkawang khususnya etnis Tionghoa sangat bersemangat karena untuk pertama kalinya Kota Singkawang dipimpin oleh etnis Tionghoa.

Pada tahun 2017 Kota Singkawang dipimpin kembali oleh etnis Tionghoa. Ada yang menarik pada politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017, dari empat calon Walikota Singkawang 2 di antaranya berasal dari etnis Tionghoa. 2 calon walikota inilah yang mewakili etnis Tionghoa sekaligus perempuan etnis Tionghoa pertama dalam mencalonkan sebagai Walikota Singkawang.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang dikarenakan tingkat kepehaman yang dimiliki meningkat dari pertama kali terlibat dalam politik. Namun, kebutuhan ekonomi juga yang melibatkan politik identitas etnis Tionghoa di Kota Singkawang.

Pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 terlaksana dengan baik, namun di belakang itu pada saat kampanye, tim sukses dari pasangan calon mati-matian untuk memperjuangkan agar calon yang dibanggakan tersebut menang, sehingga menggunakan isu politik identitas.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa ada 3 faktor yang mendorong politik identitas dalam pemilukada Kota Singkawang 2017, yaitu ;

1. *Idealisme,*

Faktor dorongan *Idealisme* warga kelompok Tionghoa untuk terlibat kedalam politik tidak terlepas dari faktor pandangan bangsa Tionghoa yang kerap bersifat *dualisme*, Yaitu di satu sisi cara hidup yang maju dan modern seperti yang dicapai oleh bangsa Barat, yakni kemajuan

teknologi tinggi yang diikuti dan ditiru, sedangkan di satu sisi tetap mempertahankan cara hidup tradisionalisme Cina yang berdasarkan konfusianisme yang dianggap melahirkan kearifan sebagai orang Timur yang lebih baik dari bangsa mana pun di dunia.

Dasar idealisme etnis Tionghoa terlibat dalam politik adalah NKRI. Mengalir dari idealisme ada idealistis bahwa rakyat Indonesia harus di sejahterakan, harus di kukuhkan jiwa persatuan dan kesatuannya. Dengan idealisme yang seperti itu, hasil perjuangan politik etnis Tionghoa tetap untuk NKRI, sedangkan inti dari idealisme NKRI adalah etnis Tionghoa tetap memegang teguh satu nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Idealisme yang merupakan keyakinan individu atas hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya dan kebiasaan. Tidak bisa dipungkiri untuk faktor idealisme dalam politik identitas tersebut, mayoritas etnis Tionghoa yang setiap tahunnya meningkat membuat keinginan bergabung dalam perpolitikan di Kota Singkawang.

Etnis Tionghoa yang tergabung dalam dunia politik sangat idealisme dalam politik, ini dikarenakan sudah tidak ada lagi yang melarang untuk demokrasi dan sudut pandang serta cita-cita untuk negara harus di laksanakan.

Banyak yang memiliki idealisme tetapi tidak semua orang berani menampilkannya. Dalam dunia politik etnis Tionghoa pasti memiliki

idealisme karena idealisme seseorang itu bagus maka, dapat memberikan figur yang baik untuk di contoh.

“Kita gak bisa pungkiri bahwa faktor idealisme itu masuk dalam politik. Ada orang yang mempunyai faktor idealisme yang tinggi betul-betul ada banyak bukan hanya di bidang politik. Buat kami etnis tionghoa, maaf ya, saudara Basuki cahya purnama (Ahok) adalah figur idealis yang memberikan contoh yang bagus teladan yang patut di ikuti dalam dunia politik (wawancara perwakilan tim sukses pada tanggal 5 November 2017).”

Faktor idealisme yang digunakan dalam hal yang positif maka menghasilkan hasil yang positif begitupun sebaliknya. Dalam konteks ini dapat dilihat faktor idealisme secara teori dan fakta di lapangan maka, politik identitas etnis Tionghoa di Kota Singkawang pasti memiliki faktor idealisme, tetapi yang berani menunjukkan idealisme hanya segelintir orang berani menanggung resiko yang diambilnya.

Untuk masyarakat tionghoa Kota Singkawang juga idealisme dalam memilih pada saat pemilukada kemarin dengan memilih calon etnis Tionghoa sebagai walikota sudah termasuk idealisme. Karena masyarakat etnis Tionghoa berfikir bahwa kelompok dari etnis Tionghoa juga bisa menang dalam pemilukada dan menjadi walikota seperti yang pernah dilakukan oleh etnis lain terdahulu.

Faktor *idealisme* dalam politik identitas etnis Tionghoa dalam Pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 sangat terlihat faktanya di lapangan dan yang berani menunjukkan idealisme hanya segelintir saja. Kelompok etnis Tionghoa ingin memperbaiki relasi sosial dengan kelompok etnis yang ada di Kota Singkawang mengingat realitas masyarakatnya pluralistik.

Sebagai warga negara Indonesia yang sah, warga kelompok etnis Tionghoa untuk terjun di bidang politik sebenarnya merupakan haknya yang normal dan dijamin oleh konstitusi. Namun, yang tidak wajar manakala etnis Tionghoa menjadi anggota legislatif atau kepala daerah menggunakan faktor idealisme merujuk kearah yang negatif, sehingga dalam mengambil kebijakan menjadi tidak adil. Hal itu akan berat pada kelompok etnisnya sendiri dan diragukan kemampuannya ketika etnis Tionghoa yang memimpin di Kota Singkawang oleh pihak kelompok etnis yang lain.

2. *Pragmatisme,*

Pragmatisme adalah pemahaman dalam menanggapi suatu fenomena yang sedang terjadi dengan lebih mementingkan sisi kepraktisan dibandingkan manfaat yang antara lain bertujuan menyelamatkan dan mengamankan aset yang telah diperoleh selama era Orde Baru dimana ada peristiwa yang terjadi pada kalangan kelompok Tionghoa tidak memiliki politisi yang dapat memperjuangkan aspirasi kelompok Tionghoa.

Politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 tidak begitu terlihat untuk faktor pragmatisme ini. Karena tidak banyak masyarakat Tionghoa Kota Singkawang yang beranggapan bahwa karena kelompok Tionghoa tidak memiliki politisi yang dapat memperjuangkan aspirasi mereka.

Faktanya sekarang banyak dari kelompok tionghoa yang tergabung di dalam politik dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat

Tionghoa. Ada juga yang beranggapan walaupun kelompok Tionghoa bergabung di dalam politik tetapi sama saja tidak ada yang bisa memperjuangkan aspirasi dari kelompok Tionghoa, mungkin kejadian ini disebabkan oleh permasalahan bahasa sehingga kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya kepada lembaga legislatif atau bahasa yang digunakan tidak bisa dipahami dengan baik oleh lembaga legislatif.

Masyarakat Tionghoa yang seperti ini adalah masyarakat Tionghoa yang belum mendapatkan pendidikan, yang tidak mendapatkan pendidikan, beranggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting yang terpenting cari uang untuk makan dan tidak paham sama sekali dengan politik.

“waktu pemilu kemarin banyak juga masyarakat Tionghoa yang memilih dengan asal memilih. Ya, ini masyarakat yang kurang dalam pendidikan dan terpengaruh hadiah-hadiah yang di beri saat kampanye jadi mereka dak bisa baca situasi nanti kedepannya gimana dan seperti apa.” (wawancara masyarakat Singkawang, pada tanggal 13 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa masih ada masyarakat Tionghoa yang memilih pemimpin hanya asal memilih tidak memikirkan untuk kedepannya. Karena pemahaman tentang politik dan aspirasi sangatlah kurang, hal ini menunjukkan sikap ketidakpedulian masyarakat Tionghoa dalam berpolitik.

Pada saat pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 kemarin, banyak dari masyakarat etnis Tionghoa yang sudah bisa menilai dengan melihat fenomena yang terjadi di Kota Singkawang. Tetapi tidak sedikit masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang beranggapan tergabungnya

kelompok Tionghoa kedalam dunia politik bukan karena peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi karena UU yang telah mengizinkan.

Melihat fenomena ini banyak masyarakat Tionghoa yang menggunakan peluang itu untuk mengambil kesempatan dalam mencari rezeki, berdemokrasi, mencari pengalaman, membangun kota menjadi lebih maju, menyejahterakan masyarakat yaitu salah satunya dengan bergabung di dunia politik.

Jadi, dapat disimpulkan faktor *pragmatisme* pada politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilu pada Kota Singkawang tahun 2017 sangat sedikit dan tidak begitu terlihat dengan jelas. Hal ini disebabkan sudah banyak masyarakat etnis Tionghoa yang paham dengan politik dan UU yang telah mengizinkan etnis Tionghoa untuk berdemokrasi memperjuangkan hak-haknya. Dengan begitu etnis Tionghoa yang duduk di legislatif dapat berkomunikasi dengan masyarakat etnis Tionghoa dengan lebih lancar sehingga, masyarakat etnis Tionghoa bisa menyampaikan aspirasinya tanpa ada rasa segan.

3. *Kekuasaan,*

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Untuk pemilu pada Kota Singkawang tahun 2017 sangat terlihat sekali faktor kekuasaan yang paling mendominasi, siapa yang memiliki kekuasaan yang paling besar maka, peluang untuk memenangkan pemilu juga semakin

besar. Faktor kekuasaan merupakan penyebab keterlibatan tiap warga negara ke dalam politik, karena setiap warga negara hanya dapat menciptakan kebijakan publik sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan aspirasi dari warga negara dan hal itulah yang harus dilakukan melalui keterlibatannya secara langsung ke dalam politik.

Namun warga kelompok Tionghoa tidak mengakui hal ini secara langsung. Warga kelompok Tionghoa lebih memilih mengucapkannya dengan perkataan diplomatis. Ada pepatah Tionghoa yang mengatakan bahwa orang Tionghoa yang bergabung dalam dunia politik atau bermain politik bukanlah sembarangan orang, karena orang Tionghoa yang tergabung dalam dunia politik adalah orang yang pintar, dan punya banyak uang.

“Ada pepatah Tionghoa yang mengatakan orang yang bisa main politik itu bukan sembarangan orang, dia harus pintar, dia harus banyak duit dan berkharisma. (wawancara perwakilan tim sukses pada tanggal 5 November 2017).”

Tidak hanya itu, pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 terlihat sekali pada saat kampanye, dimana lokasi Singkawang Tengah yang memiliki mayoritas penduduk beragama islam terlihat jelas memilih etnis tionghoa salah satunya pasangan nomor urut 2. Hal ini disebabkan adanya pemberian uang kepada masyarakat pada saat kampanye agar memilih pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 2 menyuruh orang yang sangat berpengaruh di daerah Singkawang Tengah melakukan hal tersebut.

“ itu pak haji yang punya pesantren di Condong (Singkawang Tengah) itu, kemarin dia dipanggil Ibu Tjhai Cui Mie untuk dimintai tolong, di tanyain mau apa, pak haji itu minta duit 10 juta untuk di bagikan ke murid pesantren, warga sekitar situ. Di setuju sama Ibu Tjhai Cui Mie, lalu apa pas pemilu hampir mengungguli, padahal mayoritas di sana bukan Tionghoa.” (wawancara perwakilan tim sukses pada tanggal 5 November 2017).

Berdasarkan wawancara di atas terlihat sekali bentuk kekuasaan digunakan, saat orang yang sangat berpengaruh itu meminta kepada pihak paslon nomor urut 2 memberikan uang sebesar 10 juta agar bisa diberikan kepada masyarakat sekitar di daerah Singkawang Tengah. Alhasil pada saat perhitungan suara pemilukada dilaksanakan terbukti paslon nomor 2 mendapatkan perolehan 9.029 suara hanya selisih 555 suara dari pasangan nomor urut 3 yaitu H. Abdul Mutalib, SE., ME dan Muhammadin, SE di Singkawang Tengah mayoritas muslim dan Singkawang Barat mayoritas Tionghoa. Hal ini bisa terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017

No	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN					
		SINGKAWANG BARAT	SINGKAWANG SELATAN	SINGKAWANG TENGAH	SINGKAWANG TIMUR	SINGKAWANG UTARA	JMH AKHIR
1.	Tjhai Nyit Khim, SH dan H. Suriyadi. Ms., S.Sos, M.Si	3.000	3.300	2.928	1.777	1.234	12.239
2.	Tjhai Chui Mie, SE dan Drs.H. Irwan, M.Si	11.405	10.137	9.029	4.683	3.232	38.486
3.	H. Abdul Mutalib, SE. ME dan Muhammadin, SE	3.327	3.822	9.584	1.115	6.393	24.241
4.	Andi SyarifT.U.W., ST, MT, M.Si (Han) dan dr. H. Nurmansyah, M.Kes	2.022	2.577	6.763	1.496	2.463	15.321
	Jumlah Suara Sah Calon	19.754	19.836	28.304	9.071	13.322	90.287

Sumber: Kpu Kota Singkawang (2017: c)

Berdasarkan fakta di lapangan faktor kekuasaan dalam politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 sangat terlihat sekali dan hal seperti ini tidak bisa dipungkiri dalam kasus politik. Faktor kekuasaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam konteks politik pada saat pemilukada, namun faktor kekuasaan ini tentu didorong oleh masyarakat sekitar, jika masyarakat sekitar mendukung tentu faktor kekuasaan ini juga sangat mudah di peroleh begitu pula sebaliknya.

Secara praktis, tujuan keterlibatan kelompok Tionghoa dalam politik adalah kekuasaan. Pasti dorongan kekuasaan karena siapa pun yang terlibat di dalam politik dan memperolehnya adalah kekuasaan. Kalau bisa masuk ke dalam pelaku kekuasaan maka, dapat mengatur atau menata apa yang selama ini menjadi program pembangunan yang sudah di rencanakan itu sangat baik bagi rakyat secara keseluruhan. Hal ini sangat menarik bagi masyarakat tionghoa untuk masuk ke dalam dunia politik dan tidak hanya dipandang sebagai bangsa pedagang.

Sebagian masyarakat etnis Tionghoa ingin mengubah pandangan sebagai bangsa pedagang walaupun itu sangat sulit. Karena masyarakat Tionghoa sebagian besar adalah pedagang hal itu memang tidak bisa dipungkiri, namun masyarakat Tionghoa juga termasuk masyarakat yang sangat pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada termasuk dalam politik yang dianggapnya sebagai peluang terbesar dalam memperoleh kekuasaan.

Dapat disimpulkan faktor kekuasaan di politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 sangat terlihat jelas dalam mempengaruhi untuk memenangkan pemilukada di Kota Singkawang. Terbukti bahwa keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik di Kota Singkawang adalah kekuasaan, karena jika sudah masuk ke dalam pelaku kekuasaan dapat ikut mengatur atau menata program pembangunan yang dianggap sangat baik bagi rakyat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, menjalankan kekuasaan dengan berlandaskan etika dan moral yang berlaku. Artinya bahwa kebijakan seorang yang mempunyai kekuasaan harus dalam diterima oleh semua golongan di dalam masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya karena perumusan dan pelaksanaannya berdasarkan aturan hukum, bukan hanya dengan kekuasaan belaka.

B. Penggunaan Politik Identitas Etnis Tionghoa Dalam Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2017

Politik identitas etnis Tionghoa di Kota Singkawang merupakan fenomena yang nyata terjadi. Tidak bisa dipungkiri untuk hal tersebut, mayoritas etnis Tionghoa yang setiap tahunnya meningkat membuat keinginan bergabung dalam perpolitikan di Kota Singkawang. Peluang masuk untuk bergabung di dalam dunia politik adalah salah satu peluang terbesar bagi masyarakat Singkawang khususnya etnis Tionghoa.

Tidak hanya itu ada masyarakat Singkawang yang menilai bahwa politik identitas etnis Tionghoa ini positif, mengikuti perkembangan daerah setempat. Hanya saja politik etnis Tionghoa di Singkawang pada

saat memilih seorang pemimpin memiliki kepentingan-kepentingan atau harapan tertentu di belakangnya bagi orang-orang yang pro terhadap masing-masing etnis. Di karenakan Singkawang memiliki berbagai macam etnis jadi, latar belakang pendidikan sangat dilihat bagi pemilih senior untuk mempengaruhi situasi dalam memilih pemimpin.

Kemudian, hasil dari itu semua masyarakat juga dapat melihat hasil kerja dari pemimpin yang bersangkutan bagi etnis Tionghoa maupun etnis lainnya. Namun, sebagian dari masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang juga ada yang beranggapan politik ini sebagai politik kebutuhan, karena dari ikut ke dalam dunia politik bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada berdagang. Jadi hal ini lah yang sangat di manfaatkan oleh politik identitas etnis Tionghoa yang ada di Kota Singkawang, secara tidak langsung ingin menguasai dua bidang yang paling berpengaruh yaitu ekonomi dan politik.

Pada kampanye pemilukada februari 2017 tim sukses dari beberapa pasangan calon walikota mendatangi masyarakat yang ada di daerah-daerah tertentu, tim sukses dari pasangan calon walikota menawarkan beberapa program dan janji-janji yang akan di penuhi jika pasangan calon mereka terpilih nanti, tetapi nyatanya masyarakat tidak ingin janji itu. Masyarakat menginginkan apa yang dapat masyarakat dapatkan sekarang dari pasangan calon yang tim sukses banggakan tersebut.

“waktu saya menjadi tim sukses Ibu Malika, saya ke daerah singkawang barat menawarkan ini menawarkan itu, sudah seperti sales lah

saya, tapi apa masyarakat disana udah dak peduli dengan iming-iming seperti itu mereka mau apa yang bisa kita beri ke mereka sekarang bukan nanti”. Mereka bilang “tidak usah janji-janji terus kalau terpilih nanti pasti lupa dengan janjinya, sekarang bapak punya apa yang bisa bapak kasi ke kami semua, jangan omong-omong saja.” (wawancara Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 5 november 2017)

Hal ini terlihat sangat jelas bahwa politik yang ada di Kota Singkawang merupakan politik kebutuhan baik itu dari anggota legislatif nya langsung atau dari masyarakat Kota Singkawang nya. Jadi masuknya atau bergabungnya masyarakat ke dalam dunia politik bisa dibilang karena kebutuhan hanya ingin memenuhi kebutuhan ekonomi.

Terlihat sangat jelas perjuangan dari tim sukses pasangan calon walikota. Tim sukses pasangan calon jika berhasil memenangkan pemilukada 2017 pasti mendapatkan *reward*. *Reward* yang mereka dapatkan adalah uang dan untuk *feedback* nya sendiri bagi tim sukses yang menang adalah menjadi anggota DPRD tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun.

“saya, kalo kemarin bisa menangin Ibu Malika dalam pemilu kemarin, saya dapat duit, lalu saya mau di masukin ke anggota DPRD tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi nyatanya kalah. Saya sampai masuk penjara, dituduh sebagai ketua tim sukses, padahal secara *de jure* saya tidak termasuk kedalam tim sukses. Dan setelah saya terbukti bersalah di pengadilan provinsi, dari tim sukses sebelah diam saja tidak lagi berkoar-koar, tapi saya sekarang malah di tawarkan masuk PDI-P oleh walikota terpilih.” (wawancara tim sukses pasangan calon urut 1 pada tanggal 5 November 2017)

Setiap tim sukses pasti memiliki *reward* dan *feedback* yang berbeda – beda jika pasangan calon yang dibawanya tersebut menang dalam pemilu. Untuk pasangan calon yang menang dalam pemilukada

2017 mendapatkan reward dan feedback dalam bentuk uang. Di karenakan ketua tim sukses dari pasangan yang menang pemilukada 2017 adalah ketua DPRD Kota Singkawang periode 2014 – 2019.

Strategi dalam memenangkan pemilukada 2017 tidak ada strategi khusus atau istimewa. Akan tetapi hal yang dilakukan sama saja seperti tim sukses pada umumnya, mendatangi masyarakat menjelaskan prestasi dan keistimewaan dari pasangan yang mereka bawa. Menyakinkan masyarakat bahwa pasangan calon walikota yang mereka bawa bisa membuat Kota Singkawang menjadi lebih baik lagi serta memberi sedikit rezeki seperti uang atau sembako untuk masyarakat.

Akan tetapi semangat masyarakat etnis Tionghoa sangat tinggi pada saat etnis Tionghoa pertama kali terpilih. Jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan sebelumnya, semangat etnis tionghoa untuk bergabung dalam dunia politik menurun, ini sebabkan kekecewaan masyarakat etnis Tionghoa terhadap walikota dari etnis Tionghoa sebelumnya. Adapun kekecewaan masyarakat Tionghoa dengan pemimpin dari etnis Tionghoa karena masyarakat etnis Tionghoa mengharapkan sesuatu dari pemimpin etnis Tionghoa yaitu Hasan Karman. Tetapi apa yang masyarakat harapkan tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah janji-janji dan sikap seenaknya terhadap masyarakat serta banyak memberikan peluang kepada pengusaha.

Dampak dari hal tersebut ada pada saat pemilukada Kota Singkawang februari 2017. Melemahnya semangat dan partisipasi dari

masyarakat Kota Singkawang khususnya etnis Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa beranggapan calon walikota tahun 2017 ini tidak menarik, tidak memiliki kharisma dan calon dari etnis Tionghoa tidak ada yang laki-laki. Banyak dari masyarakat etnis Tionghoa beranggapan bahwa yang menjadi pemimpin tidak boleh perempuan karena kaisar itu laki-laki tidak ada yang perempuan.

“ kemarin kampanye saya udah seperti sales, bangga ketuanya wakilnya, tapi apa masyarakat menilai siapa dulu ketuanya, mereka bilang seperti tidak ada pemimpin dari etnis Tionghoa, dua-duanya perempuan tapi mau gimana lagi hanya itu calon dari etnis Tionghoa, mereka juga banyak kasi duit, jadi pilih yang banyak kasi duit.” (wawancara Tim Sukses pada tanggal 5 november 2017)

Bahkan masyarakat beranggapan khususnya masyarakat Tionghoa pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 seperti tidak memiliki pemimpin. Membuat masyarakat tionghoa enggan untuk memilih, masyarakat Tionghoa lebih memilih untuk golput saja.

“ kami orang Tionghoa seperti agama islam bahwa yang menjadi imam itu laki-laki, jadi menurut kami pemilu kemarin dak ada calon, dua-duanya perempuan. Menurut kami politik perempuan Tionghoa dan laki-laki itu berbeda.” (wawancara masyarakat tionghoa pada tanggal 11 november 2017)

Banyak juga yang beranggapan bahwa sangat berbeda sekali politik perempuan Tionghoa dan politik laki-laki Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa beranggapan bahwa yang lebih pantas untuk memimpin adalah laki-laki bukan perempuan, karena kebanyakan yang memiliki kharisma power itu banyak dari laki-laki.

Begitu pula untuk pasangan calon nomor urut 1 ini ibu Tjhai Nyit Khim, SH atau biasa di kenal Ibu Malika adalah istri dari walikota singkawang yaitu Drs. Awang Ishak. Ibu Tjhai Nyit Khim, SH merupakan dari etnis Tionghoa yang mualaf ke agama islam. Pengalaman organisasi Ibu Tjhai Nyit Khim, SH bisa di bilang tidak ada sama sekali, hanya aktif di kegiatan sosial itu pun jika ada.

“waktu saya mempromosikan Ibu Tjhai Nyit Khim, SH alias ibu malika dan bapak H. Suriyadi. MS., S.Sos M.Si ke masyarakat kan, saya bingung apa yang mau saya banggakan dari Ibu Malika tidak ada prestasinya. Saya bilang ibu malika aktif di kegiatan sosial, kalau bapak suriyadi jelas prestasinya banyak. Tapi masyarakat yang menilai mereka yang lihat siapa kepala nya bukan siapa wakilnya. Saya juga dak tau Ibu Malika ini di jadikan boneka pak awang atau tidak, nah di situlah permainan politiknya bapak Awang Ishak.” (wawancara Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 5 november 2017).

Berdasarkan wawancara bersama tim sukses pasangan calon nomor urut 1 terlihat sangat jelas bahwa pentingnya prestasi, pengalaman dan organisasi yang berkaitan dengan politik, agar jika sudah terjun ke dunia politik tidak lagi awam akan hal-hal berbau politik. Dan mengerti maksud tujuan masuk dan mencalonkan diri menjadi calon walikota. Karena tidak sedikit masyarakat yang bisa menilai dengan jeli. Masyarakat juga mengira ini merupakan permainan politik yang di gunakan oleh Walikota Singkawang. Ada juga yang mengatakan bahwa Ibu Tjhai Nyit Khim, SH merupakan boneka nya Awang Ishak.

Dalam partisipasi politik dari masyarakat Kota Singkawang bisa dikatakan rendah. Menurunnya semangat dan partisipasi dari masyarakat membuat tingkat angka pemilih di Kota Singkawang pada saat pilukada

tahun 2017 juga menurun. Tingginya angka pemilih tidak pernah melebihi angka diatas 60%. Hal ini tingginya angka golput dan kurang pahamnya masyarakat tentang arti partisipasi politik.

Tabel 3.2
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMILU DI KOTA SINGKAWANG

No	TAHUN	PARTISIPASI PEMILIH
1.	PILEG 2004	74,44%
2.	PILPRES PUTARAN I 2004	67,36 %
3.	PILPRES PUTARAN II 2004	65,07 %
4.	PILKADA 2007	66,33 %
5.	PILEG 2009	59,07%
6.	PILPRES 2009	59, 33 %
7.	PILKADA 2012	63, 46 %
8.	PILEG 2014	57,99%
9.	PILPRES 2014	57,16 %
10.	PILKADA 2017	58,45%

Sumber: Kpu Kota Singkawang (2017)

Berdasarkan tabel di atas terlihat sangat jelas bahwa partisipasi pemilih di Kota Singkawang pada tahun 2007 hingga 2017 menurun. Ini dikarenakan masyarakat Kota Singkawang khususnya etnis Tionghoa kurang antusias untuk pemilukada tahun 2017 salah satunya kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin etnis

Tionghoa yang pernah menjabat pada tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada tahun 2017 masyarakat kecewa karena pasangan calon walikota tidak ada yang diharapkan oleh masyarakat khususnya etnis Tionghoa.

Penggunaan Politik Identitas Etnis Tionghoa Dalam Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2017 dapat dilihat menggunakan tiga indikator dibawah ini yaitu :

1. Narasi Besar,

Narasi Besar adalah perbedaan yang berkaitan dengan fakta atau rencana mendasar yang sudah dibuat namun sering menjadi wacana. Dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 banyak sekali rencana yang sudah dibuat namun tidak terlaksana sama sekali. Bahkan rencana yang paling mendasar dan sederhana sekalipun.

Pada saat masa kampanye berlangsung tim sukses dari pasangan calon terpilih meminta untuk pada saat promosi program berlangsung, menggunakan media infocus, agar masyarakat bisa melihat dengan jelas dan melihat video saat acara belum berlangsung. Faktanya hal tersebut tidak terlaksana, alhasil pada saat mempromisikan program tidak ada hal yang menarik yang bisa di tampilkan untuk masyarakat. Padahal infocus ini bisa dipinjam, disewa atau bahkan beli saja yang murah.

“sangat banyak rencana yang sudah di rencanakan tapi tidak terlaksanakan, tidak sesuai apa yang diharapkan, salah satunya infocus. Kita mau promosi program, maksud saya sebelum acara di mulai putarkan lah dulu video

apakah biar masyarakat dak bosan nunggu. Tapi apa, tidak dikasi sama sekali infocus, kalo beli paling cuma berapa kan, orang udah nyalon pasti ada duitnya, ini sama sekali tidak ada. Jangankan infocus, saya mau minta baju kampanye aja tidak di kasi. Itulah dia kenapa banyak rencana yang tidak terlaksana, salah satunya karena duit. 50% keatas banyak program yang tidak terlaksana, ya salah satunya dana, karena dana itu adalah hal yang paling utama dalam masa kampanye untuk menarik masyarakat. “(wawancara Tim Sukses pada tanggal 5 november 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan banyak sekali program atau rencana yang sudah disusun sedemikian rupa sudah bagus, akan menjadi tidak terlaksana dikarenakan masalah dana walaupun program yang sederhana sekalipun.

Tidak hanya dengan tim sukses terpilih, tetapi tim sukses pasangan calonurut 1 juga demikian, bahkan lebih dari 60% program tidak terlaksanakan. Hal tersebut juga di karenakan masalah dana. Bisa dikatakan pentingnya dana yang banyak untuk menjalankan sebuah program atau rencana yang sudah disusun sedemikian bagus dan rapi sehingga bisa terlaksana sebagaimana yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017, dari 100% program yang sudah di susun dengan rapi dan bagus 50% ke atas hanya sebuah narasi besar atau sebuah wacana. Hal ini disebabkan minimnya uang untuk mensukses program dalam kampanye serta sangat pentingnya uang agar program yang telah dibuat tidak menjadi narasi besar. Oleh sebab itu, pasangan calon maupun tim sukses harus bisa berinisiatif untuk mendapatkan asupan uang agar dalam melaksanakan program atau rencana tersebut bisa berjalan sebagaimana yang di harapkan.

2. *Apartheid terbalik*

Apartheid terbalik adalah kekuasaan tidak dapat di taklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagian tujuan gerakan, pemisah dan pengecualian diri yang diambil sebagai jalan keluar. Di Kota Singkawang dalam politik identitas etnis Tionghoa ketika pemilu pada 2017 sangat mungkin terjadi *Apartheid* terbalik. Hal ini terjadi kembali saat pemilu pada 2017 dimana etnis Tionghoa yang memenangkan pemilu tersebut.

Sekarang ini pemikiran untuk merebut kembali kekuasaan dikarenakan pengecualian etnis tidak lagi menjadi strategi ambisius politik etnis Tionghoa. Politik etnis Tionghoa tidak sedikit yang sudah paham maksud dan tujuan masuk ke dalam dunia politik. Pada tahun 2007 dimana etnis Tionghoa untuk pertama kalinya memimpin Kota Singkawang. Pada saat inilah ada beberapa yang berfikir bahwa merebut kekuasaan dalam memimpin dikarenakan pengecualian etnis, pembedaan ras dsb. Ini disebabkan masih adanya pemikiran atas kejadian masa lalu pada saat zaman orde baru salah satunya adalah Hasan Karman mantan Walikota etnis Tionghoa pertama di Kota Singkawang.

Salah satu alasan Hasan Karman mau mencalonkan diri dan akhirnya menang adalah ingin menguasai apa yang sudah di raihinya, tetapi tanggapan dan pandangan masyarakat terhadap mantan walikota ini sangat jelek sehingga berimbas pada tahun 2017. Tidak sedikit juga masyarakat berpandangan positif terhadap pemimpin etnis Tionghoa. Hanya masyarakat yang merasa harapan serta pemimpinnya.

Walaupun Kota Singkawang merupakan mayoritas etnis Tionghoa, untuk hal pembedaan Ras masih sering terjadi dan ini sangat mungkin terjadi. Peristiwa ini terjadi yang di lakukan oleh oknum-oknum yang memiliki jabatan di kalangan masyarakat.

“ Banyak pembedaan ras di masyarakat khususnya masyarakat Tionghoa yang maaf ya, miskin. Yang tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, yang dak tau ngurus BPJS, dan pelayanan-pelayanan yang memudahkan mereka. Masih juga dibedakan oleh polisi. Jangan jauh-jauh lah, keluarga saya dibedakan oleh polisi. Jangan jauh-jauh lah, keluarga saya yang tidak tau ngurus BPJS, sekalinya mau berobat malah di nomor 2 kan, gitu juga saat pembuatan e-ktp disuruh ini disuruh itu dibuat ribet lah, biar bolak-balik sampai 3, 4 kali. Kalau orang yang malas, pasti dia udah berfikir udah lah dak usah aja. Banyak pembedaan Ras khususnya dalam pelayanan masyarakat, itulah pentingnya kita tau politik, kita tau dalam hal pelayanan. Kalau tidak tau, ya udahlah.” (wawancara Tim Sukses pada tanggal 5 november 2017).

Berdasarkan wawancara di atas terlihat sangat jelas bahwa pembedaan ras. Walaupun Kota Singkawang dikenal sebagai kota yang sangat toleran terhadap etnis, tetapi masih ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam skala jumlah yang tidak terlalu banyak khususnya di dalam pelayanan masyarakat. Melihat situasi di lapangan masyarakat etnis Tionghoa tidak ada yang bergabung di dalam dunia pelayanan masyarakat langsung dikarenakan masyarakat etnis Tionghoa jarang yang mau menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 terjadinya *Apartheid* terbalik. Hal ini sangat jelas bahwa yang memenangkan pemilukada tahun 2017 adalah dari etnis Tionghoa. Pada pemilukada 2017 ini pengecualian etnis bukan lagi menjadi strategi ambisius, tetapi pahamnya masyarakat Tionghoa dengan maksud dan tujuan untuk masuk ke dalam dunia politik.

Tidak ada deskriminasi ras pada saat pemilu pada tetapi, deskriminasi terjadi dilakukan oleh oknum-oknum dan di pelayanan masyarakat langsung kepada masyarakat etnis Tionghoa yang tidak paham sama sekali dengan aturan yang ada di pelayanan. Peristiwa ini sangat disayangkan terjadi, melihat Kota Singkawang merupakan kota yang memiliki masyarakat realitas pluralistik.

3. *Kelompok Khusus,*

Kelompok khusus adalah sekelompok masyarakat karena keadaan fisik, mental maupun sosial budaya dan ekonomi yang mengadakan perkumpulan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Mayoritas Tionghoa di Kota Singkawang tidak menghilangkan pemikiran masyarakat terhadap kelompok – kelompok khusus. Di Singkawang memiliki kelompok khusus etnis Tionghoa salah satunya adalah kelompok khusus Hakka, dimana masyarakat Tionghoa Singkawang merupakan mayoritas Hakka termasuk walikota terpilih 2017.

Dalam pemilu pada 2017 di Kota Singkawang yang sudah selesai dilaksanakan pada bulan februari 2017 memungkinkan terjadinya kelompok khusus yang di istimewa khususnya pada etnis Tionghoa. Menurut pandangan masyarakat Singkawang etnis Tionghoa mengistimewakan etnisnya sendiri tetapi pada saat kampanye berlangsung. Dalam pandangan tim sukses yang sudah di wawancarai tidak adanya kelompok yang di istimewa.

“ untuk tim sukses ya, tidak ada mengistimewakan kelompok khusus baik dari etnis Tionghoa sendiri maupun Melayu, Madura dsb. Menurut kami semuanya sama, mereka juga nantinya memilih pemimpin untuk memimpin daerah yang kita semua tempati, suara masyarakat merupakan kunci penentu pemenang, jadi bagi kami semuanya sama tidak ada yang dibedakan. Mungkin

kelompok-kelompok tertentu yang merasa di istimewa atau mengistimewakan sendiri. “(wawancara Tim Sukses pada tanggal 5 november 2017).

Melihat fakta di lapangan dan wawancara pada tim sukses tidak adanya kelompok khusus yang di istimewa dalam hal kampanye dan pemilukada ini semuanya dianggap sama dan tidak ada pilih kasih. Namun pada kelompok khusus Hakka terlihat jelas bahwa mereka mengistimewakan kelompok dari golongan sendiri.

“ Jika ada acara tertentu kami pasti di undang untuk meliput dimasukan ke koran atau televisi khusus Tionghoa, karena kami Hakka mempunyai media masa sendiri seperti koran tapi pakai bahasa mandarin. Cetak korannya itu tidak hanya di Singkawang, tetapi di Jakarta juga ada. Tapi untuk pemilu kemarin, kami inisiatif sendiri terjun langsung melihat kejadian yang ada, karena ibu Tjhai Cui Mie sendiri salah satu kelompok Hakka yang akhirnya terpilih menjadi walikota Singkawang periode berikutnya. “(wawancara pengurus kelompok Hakka, pada tanggal 15 November 2017)

Berdasarkan wawancara di atas secara tidak langsung kelompok Hakka mengistimewakan golongan Hakka, dari inisiatif untuk melihat fenomena pemilukada dan meliput fenomena yang melibatkan kelompok Hakka tersebut. Dalam hal kampanye pemilukada sedikit sekali terlihat kelompok khusus yang di istimewa, tetapi untuk acara tertentu etnis Tionghoa mengistimewakan etnis Tionghoa dalam acara Cap Go Meh. Masyarakat etnis Tionghoa beranggapan acara tersebut merupakan acara yang sangat sakral setiap tahunnya. Pada saat memewawancari tim sukses ibu Tjhai Cui Mie mendapatkan sedikit bocoran bahwa nanti pada saat ibu Tjhai Cui Mie sudah sah menjadi walikota Singkawang anggaran Cap Go Meh yang akan di keluarkan sekitar 10 Miliar Rupiah.

“ karena event Cap Go Meh ini ada dua dimensi secara itu ini adalah event kota profesional, secara spiritual ini event sembahyang ada acara ritualnya, tapi kalau ada orang yang banyak uang dia udah anggap ini salah satu proyek. Event

Cap Go Meh tahun ini ya, 10 M dananya, karena kebetulan walikotanya dari etnis Tionghoa dia mau bikin meriah, 10 M bayangkan duit sebanyak itu, ya mungkin nanti panitia tahun 2018 ini benar-benar bekerja dengan hati, uang 10 M itu tersalurkan dengan baik.” (wawancara Tim Sukses pada tanggal 5 november 2017).

Melihat hasil wawancara tersebut sangat terlihat jelas bahwa etnis Tionghoa memang tidak ada kelompok khusus yang di istimewaikan ataupun mengistimewakan dalam hal politik, tetapi mengistimewakan golongan Tionghoa sendiri dalam acara yang lainnya, yang masih berhubungan dengan etnis Tionghoa seperti Cap Go Meh.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 tidak adanya kelompok khusus yang di istimewaikan, karena bagi pasangan calon walikota maupun tim sukses yang terpenting ialah suara dari masyarakat, tidak memandang etnis, suku, dan agama karena semuanya sama. Dalam konteks yang lain terlihat sangat jelas, kelompok etnis Tionghoa mengistimewakan diri pada event Cap Go Meh. Etnis Tionghoa memeriahkan event Cap Go Meh tersebut dikarenakan walikota terpilih tahun 2017 merupakan dari kelompok etnis Tionghoa.